

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

The Effect of Local Financial Management and Government Internal Control System on Local Government Performance of the Bogor Regency

Asep Asrudin Fiqri¹, Imelda Sari²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI

KEYWORD *Financial Management, Internal Control System of the Government, the Government Performance*

ABSTRACT *The objectives of the research are to find out empirical evidence of the the effect of Local Financial Management and Internal Control System Government (SPIP) on Local Government Performance. This research was conducted at the Regional Device Work Unit (SKPD) in Bogor Regency, is West Bogor District. Each District of West Bogor taken three respondents namely the government, economic and administrative sections. The data used in this study is primary data obtained by distributing questionnaires directly to 41 respondents by using purposive sampling technique. Data analysis technique used in this research is Multiple Regression (Multiple Regression). The results of this study indicate that the Regional Financial Management and Government Internal Control System have a positive effect on the Performance of Local Government.*

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Pada waktu itu, akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Sehingga orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor industri dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Sektor publik merupakan semua

yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan Negara lainnya yang sudah diatur dalam Undang-undang. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia yaitu adanya pelaksanaan otonomi daerah (hak tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri) dan desentralisasi (pendelegasian wewenang).

Menurut Sujarweni (2015) Saat ini desentralisasi tidak hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun juga berlaku pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pihak swasta dengan privatisasi (pelipatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik). Otonomi daerah dan desentralisasi ini memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian *intern* pemerintah, dimana esensi pengelolaan keuangan daerah mengharuskan anggaran bertumpu pada kepentingan publik, efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel. Untuk itu peningkatan kinerja, produktivitas kerja dan tertib administrasi keuangan harus mendapat perhatian lebih.

Pengelolaan Keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban pada kurun waktu tertentu. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Dari hasil penelitian terdahulu, menurut Rayindha dan Suartana (2017) bahwa

Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Jika pemerintah mampu mengelola keuangan daerah maka tujuan dari pelayanan terhadap masyarakat tercapai, sehingga kedepannya juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pengelolaan keuangan, yang berhubungan dengan otonomi daerah dan desentralisasi adalah sistem pengendalian *intren* pemerintah. *Good governance* diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) dengan empat indikator variabel yaitu : prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban (Trisnaningsih, 2007). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja

pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintah perlu Sistem pengendalian *intern* pemerintah yang merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Sukmaningrum, 2012).

Menurut Arens (2010) sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengendalian *intern* akan tercapai jika kelima elemen pengendalian *intern* telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (PP No. 60 tahun 2008).

Dari hasil penelitian terdahulu, menurut Rayindha dan Suartana (2017) bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif pada kinerja pemerintah. Menurut Azlina dan Amelia (2014) bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif pada kinerja pemerintah. Masih sering ditemukannya kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan belum disajikan secara handal. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa laporan

keuangan belum memiliki kualitas yang baik. Semuanya bisa ditentukan dari sebuah kinerja, ketika suatu kinerja pemerintah baik, dalam artian baik disini yakni mengikuti aturan sistem pengendalian intern pemerintah, maka akan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengendalian ini merupakan cara yang dapat memberikan arahan serta mengawasi sumber daya serta memiliki peran dalam pencegahan penggelapan atau *fraud* dan melindungi sumber daya organisasi.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal ini yang akan menjadi objek penelitian adalah pemerintah daerah yang ada di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Bogor.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penemuan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan di Kabupaten Bogor yang berjumlah sebanyak 15 Kecamatan. Sampel yang diambil dari populasi dalam

penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sebanyak 41 orang dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan menyebarkan kuesioner kepada

responden yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan skor sebagai berikut: angka 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju) dan angka 1 (sangat tidak setuju). Adapun variabel operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	1) Perencanaan 2) Investigasi 3) Pengkoordinasian 4) Evaluasi 5) Pengawasan 6) Pemilihan Staff 7) Negosiasi 8) Perwakilan	Interval
Pengelolaan Keuangan Pemerintah (X1)	1) Transparan 2) Keadilan 3) Tertib 4) Taat pada peraturan perundang-undangan 5) Efisien 6) Ekonomis 7) Efektif 8) Bertanggung jawab	Interval
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	1) Lingkungan pengendalian 2) Penafsiran resiko 3) Sistem informasi dan komunikasi akuntansi 4) Aktivitas pemantauan pengendalian	Interval

Uji Kualitas Data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji validitas, Uji Reliabilitas,

Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas. Model dan teknik analisa data penelitian menggunakan pendekatan regresi linear

berganda. Model analisa regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
- a = Konstansta
- b₁, b₂ = Koefisien regresi
- X₁ = Pengelolaan Keuangan Daerah
- X₂ = Sistem Pengendalian Intern
- e = *Error term*

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk melihat variabel apa yang memberikan pengaruh paling dominan diantara variabel yang ada. Tingkat pengaruh yang signifikan juga didasarkan pada α 5%. Atau melihat nilai t hitung harus lebih besar dari t tabel. Sebaliknya jika thitung < dari t tabel maka pengaruh yang terjadi tidak signifikan.

ISI

A. Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, diperoleh hasil berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh

perempuan sebanyak 30 orang dengan persentase 73,33 persen lebih banyak dari pada laki-laki, sedangkan responden laki-laki sebanyak 11 orang dengan persentase 26,67 persen. berdasarkan usia, responden yang paling dominan adalah responden dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 44,22 persen. Responden dengan usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 42,44 persen, sedangkan responden yang paling sedikit adalah responden yang memiliki rentang usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 13,33 persen. Berdasarkan jenis pendidikan terakhir, identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tingkat SMA yaitu 21 orang dengan persentase 51,67 persen, dan untuk tamatan S1 sebanyak 16 orang dengan persentase 39,44%

sedangkan pada tingkat diploma paling sedikit yaitu 4 orang dengan persentase 8,89%. Hal ini karena masih adanya pegawai yang sedang melanjutkan pada

tingkat jenjang s1. hasil pengolahan data responden disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Demografi Responden

	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	• Laki-laki	30	73.33%
	• Perempuan	11	26.67%
Usia	• 20-30 tahun	19	44.22%
	• 31-40 tahun	16	42,44%
	• 41-50 tahun	6	13,33%
Pendidikan	• SLTA/Sederajat	21	51,67%
	• D3	4	8,89%
	• S1	16	39,44%

B. Analisis Data

Pengujian Instrumen Data

Untuk menguji instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini, maka diperlukan dua pengujian yaitu uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*). Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan atau pernyataan kuesioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan : jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner tidak valid. Sedangkan Teknik yang digunakan untuk mengukur realibilitas pengamatan adalah

dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu instrumen dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Menurut Nunnally (1967) dalam Ghozali (2006) “Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60”.

Hasil pengujian validitas dengan metode *Pearl Correlation* menunjukkan bahwa semua pernyataan didalam kuesioner dinyatakan valid, dengan nilai r tabel untuk variabel pengelolaan keuangan daerah, variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan variabel kinerja pemerintah daerah masing-masing sebesar 0,2605 sedangkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel

mempunyai koefisien alpha yang cukup besar yakni 0,777 dimana nilai ini lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan semua kosep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah *reliable* sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menggunakan *Uji Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengujian satu sampel

menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu Nilai Signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. Nilai Signifikan atau probabilitas > 0,05 maka distribusi data adalah normal. Berdasarkan tabel dibawah ini, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,115, lebih besar dari 0,05. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Uji Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3. *One sample Kolmogorov-Smirnov test*

		Unstandardized Residual
	N	41
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.91046348
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.072
	Kolmogorv-Smirnov Z	.124
	Asymp.Sig. (2-tailed)	.115

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah. Model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*

$< 0,01$ atau sama dengan $VIF > 10$. Sedangkan apabila nilai *tolerance* $> 0,01$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan tabel multikolinearitas, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,889 untuk variabel Pengelolaan keuangan daerah dan 0,889 untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah. Nilai *tolerance* kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,01 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 80 persen.

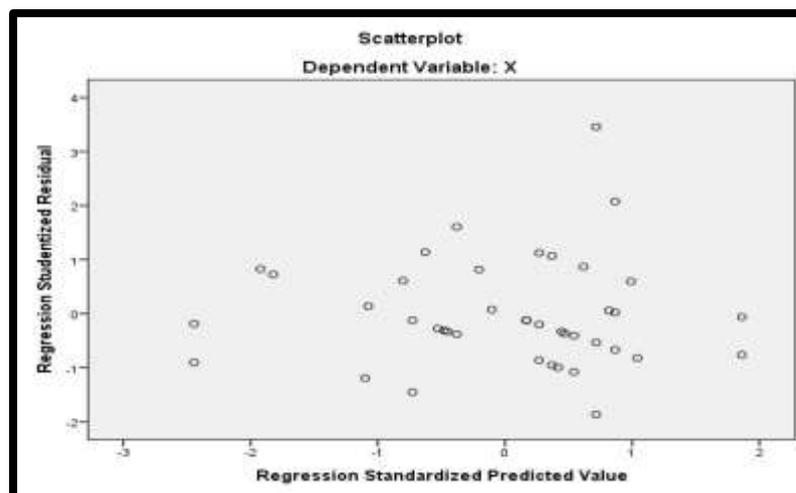
Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
pengelolaan keuangan daerah	.889	1.125
Sistem Pengendalian Intern pemerintah	.889	1.125

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah
Sumber : Output SPSS v.22



Gambar 1, Uji Heteroskedastisitas – Gambar *Scatterplot*
Sumber : Output SPSS v.22

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik tersebar dan tidak membentuk pola khusus. Dengan demikian data pada penelitian ini tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan

menggunakan uji parsial (Uji t) dan uji koefisien determinasi. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui Pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. hasil uji persial atau uji t ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized	Standardized Coefficient	
	Coefficient	t	Sig.
1 (Constant)	9.864	3.286	.002
Pengelolaan Keuangan Daerah	.295	3.665	.001
Standar Pengendalian Intern Pemerintah	.325	3.922	.000

Pengujian secara parsial yang ditunjukkan pada tabel diatas ini diperoleh dari kolom t IMB SPSS v.22. berikut ini adalah pengujian secara parsial : (1) Angka signifikan hasil penelitian adalah $(0,01) \leq 0,05$ maka data disebut signifikan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dapat diterima. (2) Angka signifikan hasil penelitian adalah $(0,00) \leq 0,05$ maka data disebut signifikan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern

pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dapat diterima.

Koefisien Determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel independen, dan kinerja pemerintah sebagai variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien Adjusted R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	
Summary ^b	
	Adjusted R
.599	
Std. Error of	

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern pemerintah, pengelolaan keuangan daerah

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah

Sumber : Output SPSS v.22

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai adjusted R^2 sebesar 0,359. Hal ini berarti sebesar 35,9% variabel dependen yaitu kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 64,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

DISKUSI

Menurut Undang-undang Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Hipotesis yang diajukan pertama (H_{a1}) yang menyatakan bahwa pengaruh pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yakni menurut Rahmad Hidayat. (2009) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman, dan menurut Rayindha dan Suartana (2017) Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan dasar terciptanya kinerja pemerintah yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan kinerja pemerintah, karena adanya kinerja pemerintah yang baik akan berdampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat dan para pengguna laporan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nordiawan et all (2012), bahwa akuntansi pemerintahan memberikan informasi keuangan dari entitas- entitas yang tidak mencari laba.

Hipotesis kedua yang diajukan (Ha₂) yang menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yakni menurut Amelia *et al.* (2002) bahwa pengendalian *intern* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah merupakan syarat terciptanya kinerja pemerintah yang berdisiplin dan bertanggungjawab.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bastian (2011) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang berarti menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana jika pengelolaan keuangan baik, maka kinerja pemerintah akan baik. Hasil ini mendukung sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2009) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada instansi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

Sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang berarti menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana jika sistem pengendalian *intern* pemerintah baik, maka akan terciptanya kinerja yang baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil uji ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rayindha dan Suartana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. et all. 2014. *Auditing & Jasa Assurance. Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- , 2011. *Akuntansi Sektor Publik Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2016. *Statistik Nonparametrik*. Semarang: Badan Penebit UNDIP.
- Hidayat, Rahmat. 2009. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman)*. Padang: Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Nordiawan, Deddi. et all. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Prasatya, M Rayinda. Suartana, Wayan. 2017. *Pengaruh Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.21.2. November (2017): 1346-1372.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press